

ABSTRAK

Praktik perwakafan di Madura masih didominasi oleh perbuatan hukum wakaf yang obyek wakafnya berupa tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Akan tetapi, dalam praktiknya masih dijumpai perwakafan yang dilakukan di bawah tanah. Keengganan masyarakat melakukan wakaf secara resmi menyebabkan aset wakaf belum memiliki bukti autentik berupa sertifikat tanah wakaf. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik perwakafan tanah di Madura dan upaya perlindungan hukum apa yang dapat ditempuh oleh pelaku perbuatan hukum wakaf terhadap aset wakaf yang belum tercatat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tentang Itsbat Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbuatan hukum wakaf di Madura yang diketahui tidak terpenuhi syarat administratif wakaf dapat menimbulkan konflik atau sengketa, sehingga dapat mengganggu proses pemanfaatan harta benda wakaf. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seyogyanya dapat melakukan upaya proaktif dalam menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan Itsbat Wakaf.

Kata Kunci: Itsbat Wakaf; Penetapan Pengadilan Agama; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The practice of waqf in Madura is still dominated by legal acts of waqf whose object of waqf is land, as contained in the Waqf Information System (SIWAK). However, in practice it is still found that waqf is carried out underground. The public's reluctance to do waqf officially causes the waqf assets to not have authentic evidence in the form of waqf land certificates. The purpose of the study was to find out how the practice of land waqf in Madura and what legal protection efforts can be taken by the perpetrators of waqf legal actions against waqf assets that have not been recorded in the copy of the determination of the Religious Court Number: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk regarding Itsbat Waqf . The research method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of this study indicate that before the enactment of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, legal acts of waqf in Madura which are known to not fulfill the administrative requirements of waqf can cause conflicts or disputes, so that they can interfere with the process of utilizing waqf assets. The Religious Courts as the executor of judicial power should be able to make proactive efforts to safeguard unrecorded waqf assets through the application for Itsbat Waqf.

Keywords: *Ithbat Waqf; Determination of the Religious Courts; Legal Protection.*